

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

- Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang – Undang (Legisprudence)*, Penerbit Kencana, Jakarta.
- Adami Chazawi, 2001, *Pelajaran Hukum Pidana: Stelsel Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Andi Muhammad Sofyan, Nur Azisa, 2016, *Hukum Pidana*, PT. Pustaka Pena Press, Makassar.
- Arif Gosita, 1999, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dan Konvensi Hak Anak-Anak*, Era Hukum, Jakarta.
- Bakhrul Amal, 2018, *Hukum dan Masyarakat*, Thafa Media, Yogyakarta.
- Baharuddin Badaru, M. Syukri Akub, 2012, *Wawasan Due Process Of Law Dalam Sistem Peradilan Pidana*, PT. Pustaka Rangkang, Yogyakarta.
- Fajrurahman Jurdi, 2018, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.
- Jimli Asshiddiqie, 2014, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Mochtar Pabottinggi, 1993, *Komunikasi Politik dan Transformasi Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta.
- Maidin Gultom, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Ddalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sulchan Yasyin, 1997, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, PT.Amanah, Surabaya.
- Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, PT.Rajawali Pers, Jakarta.
- Topo Santoso, 2016, *Tindak Pidana Pemilu*, PT.Rajawali Pers, Jakarta.

JURNAL

Ardyantha Sivadabert Purba, 2015, *Potret Pandangan Akademisi di Jurnal ISIP UGM (JSP) Mengenai Permasalahan Demokrasi di Indonesia*, Jurnal Politik Muda, Volume 4 No. 1.

Benny Bambang Irawan, 2007, *Perkembangan Demokrasi di Negara Indonesia*, Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat, Volume 5 No. 1.

Hartuti Purnaweni, 2004, *Demokrasi Indonesia: Dari Masa ke Masa*, Jurnal Administrasi Publik, Volume 3 No. 2.

Heru Nugroho, 2012, *Demokrasi dan Demokratisasi: Sebuah Kerangka Konseptual Untuk Memahami Dinamika Sosial Politik di Indonesia*, Jurnal Pemikiran Sosiologi, Volume 1 No. 1.

Kiki Mikail, 2015, *Pemilu dan Partai Politik di Indonesia*, Jurnal Tamaddun, Volume XV No. 1.

Laurensius Arliman S, 2017, *Dinamika dan Gagasan Mencegah Eksploitasi Anak Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah*, Jurnal Jentera, Volume 1 No. 1.

Muhammad Afied Hambali, 2014, *Pemilukada Pasca Reformasi di Indonesia*, Jurnal RECHTSTAA FH UNSA, Volume 8 No. 1.

Rini Fitriani, 2016, *Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Hak-Hak Anak*, Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Volume 11 No. 2.

Siti Fatimah, 2018, *Kampanye Sebagai Komunikasi Politik: Esensi Strategi Dalam Pemilu*, Jurnal Revolusi, Volume 1 No. 1.

MEDIA ELEKTRONIK

Aspirasi Malut.com, 2018, *Kampanye Akbar AHM-Rivai di Ternate libatkan anak-anak*, lihat dalam www.aspirasimalut.com/kampanye-akbar-ahm-rivai-di-ternate-libatkan-anak-anak.diakses pada 25 Juli 2020.

Badan Pengawasan Pemilu, 2020, *Pilkada 2020 harap ada terobosan baru*, lihat dalam bawaslu.go.id/berita-pilkada-2020-bagja-harap-ada-terobosan-hukum-mengenai-keterlibatan-anak, diakses pada 25 Juli 2020.

Berita Malut.com, 2018, *Sambil Joget Diatas Truk Anak-Anak Ikut Kampanye*, lihat dalam www.beritamalut.com/sambil-joget-diatas-truk-anak-anak-ikut-kampanye.diakses pada 25 Juli 2020.

Publikasi dan Media Kemen PPPA, *Penandatanganan SEB Pilkada 2020 yang ramah anak*, lihat dalam : <https://kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2863/menteri-bintang-mari-wujudkan-pilkada-2020-yang-ramah-anak> , diunduh pada tanggal 8 Februari 2021

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang – Undang

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Konvensi PBB Tentang Hak-Hak Anak yang di ratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia tanggal 6 Januari 1990 dengan Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990.